

LAPORAN PROGRAM PPM



Judul:
**PELATIHAN ANALISIS KEBIJAKAN
BAGI KEPALA SEKOLAH DASAR
DI KOTA YOGYAKARTA**

Diusulkan Oleh:

Dr. RUKIYATI, M.Hum.	NIP. 19610711 198803 2 001
L. ANDRIANI PURWASTUTI, M.Hum.	NIP. 19591030 198702 2 001
T. SULISTYONO, M. Pd., MM.	NIP. 19480412 197412 1 001
DODHY HYRONIMUS AMA	NIM. 11110244015
A. MAFFATUNRU	NIM. 11110244030
PINGKAN BENING AJUBA	NIM. 11110244040

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2013**

Penelitian ini didanai dari Dana DIPA BLU UNY
No. Kontrak: 06.j/UN34.11/Kontrak/KU/2013

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT REGULER
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

1. Judul: Pelatihan Analisis Kebijakan Pendidikan bagi Kepala Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta.

2. Ketua Pelaksana:

- a. Nama Lengkap dengan Gelar : Dr. Rukiyati, M. Hum.
- b. NIP : 19610711 198803 2 001
- c. Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I/ IV b
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
- f. Bidang Keahlian : Ilmu Pendidikan
- g. Alamat Rumah : Perum Mitra Griya Asri F-13 Wedomartani,
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
- h. No. Telp. Rumah/ HP : 0274- 870194/ 085743975283

3. Personalia

- a. Jumlah Anggota Pelaksana : 2 orang
- b. Jumlah Pembantu Pelaksana : -
- c. Jumlah Mahasiswa : 3 orang

- 4. Jangka Waktu Kegiatan : 3 bulan
- 5. Bentuk Kegiatan : Pelatihan dan Bimbingan
- 6. Sifat Kegiatan : Reguler
- 7. Anggaran Biaya :
Sumber dari DIPA UNY : Rp 5.000.000,00
(Lima juta rupiah)

Mengetahui:
Ketua Jurusan FSP/KP



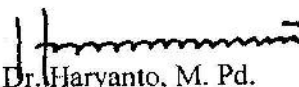
Dr. Mami Hajaroh, M. Pd.
NIP 19680308 199203 2 001

Yogyakarta, Nopember 2013
Ketua Tim



Dr. Rukiyati, M. Hum.
NIP 19610711 198803 2 001

Mengetahui
Dekan FIP



Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahNya sehingga laporan PPM ini dapat diselesaikan. Laporan ini bertujuan untuk memberi pelatihan pada para kepala sekolah dasar di wilayah UPT TK SD Yogyakarta bagian selatan dalam menganalisis kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan di tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak-terhingga kepada:

1. Dekan FIP UNY beserta segenap jajarannya atas kebijakannya memberikan bantuan biaya PPM sehingga tim pengabdian dapat merealisasikan program pengabdian ini.
2. Badan Pertimbangan PPM FIP UNY yang telah meloloskan proposal tim pengabdian sehingga kegiatan kami dapat dibiayai.
3. Ibu Dwiatmi Sutarini, M. Pd. selaku Kepala SDN Suryodiningratan III yang telah bersedia bekerja sama menjadi mitra tim pengabdian.
4. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Dasar di lingkungan UPT TK-SD Yogyakarta bagian selatan yang telah bekerja sama menjadi peserta pelatihan PPM ini.
5. Guru-guru SDN Suryodiningratan III yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini.
6. Segenap dosen Jurusan FSP/KP dan mahasiswa Prodi Kebijakan Pendidikan yang telah bekerjasama dalam program PPM ini.

Semoga Allah berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya, kritik dan saran sangat kami nantikan demi perbaikan pelatihan dan pelaporan kegiatan PPM ini.

Yogyakarta, November 2013
Ketua Tim Pengabdian,

Rukiyati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi	1
B. Landasan Teori	1
C. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Kegiatan	5
E. Manfaat Kegiatan	5
BAB II. METODE KEGIATAN PPM.....	
A. Khalayak Sasaran	7
B. Metode Kegiatan	7
C. Langkah-langkah Kegiatan	7
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM	
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	10
B. Faktor Pendukung dan Penghambat	13
C. Pembahasan	14
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PELATIHAN ANALISIS KEBIJAKAN BAGI KEPALA SEKOLAH DASAR DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:
Rukiyati
L. Andriani Purwastuti
T. Sulistyono
Dodhy Hyronimus Ama
B.Maffatunru
Pingkan Bening Ajuba

ABSTRAK

Tujuan pelatihan analisis kebijakan bagi kepala sekolah dasar di kota Yogyakarta adalah agar para kepala sekolah dan guru memperoleh wawasan, dan pendampingan sehingga dapat melakukan analisis kebijakan pendidikan di dalam lingkungan satuan pendidikan yang dipimpinnya. Pelatihan dilaksanakan di SDN Suryodiningratan III kota Yogyakarta diikuti oleh 21 orang kepala sekolah di lingkungan UPT TK-SD Yogyakarta bagian selatan dan guru SDN Suryodiningratan III.

Metode yang digunakan dalam keseluruhan pelaksanaan pelatihan ini meliputi : 1) Ceramah dan dialog untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan pendidikan; 2) Diskusi kelompok; 3) Permainan (*games*); 4) Pembimbingan dan pengamatan pada saat diskusi kelompok.

Hasil pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa : 1) Analisis kebijakan pendidikan sebagai materi pelatihan telah tersampaikan dan dapat dipahami oleh para peserta dibuktikan dengan respon positif dan pertanyaan yang diberikan oleh peserta, juga dilihat dari hasil diskusi kelompok yang berisi rancangan kebijakan untuk masing-masing sekolah; 2) Pelaksanaan PPM berupa pelatihan analisis kebijakan pendidikan untuk tingkat satuan pendidikan dapat memberi pengetahuan baru bagi para kepala sekolah dasar akan pentingnya dilakukan analisis sebelum dan setelah membuat kebijakan. Para guru menyadari bahwa ketiadaan analisis kebijakan menjadikan kebijakan sekolah yang diambil akan tidak jelas arahnya dan tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Kata kunci : kebijakan pendidikan, analisis, kepala sekolah dasar.

**POLICY ANALYSIS TRAINING FOR ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS
IN YOGYAKARTA**

By:

Rukiyati

L. Andriani Purwastuti

T. Sulistyono

Dodhy Hyronimus Ama

B. Maffatunru

Pingkan Bening Ajuba

ABSTRACT

The purpose of policy analysis training for elementary school principals in Yogyakarta is conducted so that the principals and teachers are able to gain insight and assistance to perform the analysis of education policy in their education scope unit. The training was conducted in SDN Suryodiningratan III Yogyakarta participated by 21 principals in elementary which is located in Southern side of Yogyakarta and school teachers of SDN Suryodiningratan III.

The method used in the overall implementation of this training include: 1) Lecture and discussion to make the perception of education policy; 2) Discussion group; 3) Games; 4) Coaching and observations during group discussions.

The results of training implementation showed that: 1) analysis of education policy as training material has been delivered and can be understood by the participants. It is showed by the positive response and questions provided by participants, it is also can be seen from the group discussion that contains draft policies for each school; 2) Implementation of PPM as education policy analysis training for education unit level provide new knowledge for the principals about the importance of analysis before and after establish policy. The teachers realized that the absence of education policy makes the applicable school policy does not have obvious direction and unable improve the education quality.

Keywords: Education Policy, Analysis, Elementary School Principals

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Analysis for Policy atau analisis untuk kebijakan dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan. Analisis untuk kebijakan merupakan proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu data penelitian penting digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Analisis kebijakan merupakan langkah awal dalam proses kebijakan pendidikan. Dengan adanya proses analisis, perumusan kebijakan pendidikan akan tepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Hanya yang masih sering terjadi dalam rangka merencanakan dan merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan belum melalui proses analisis kebijakan. Oleh karena itu penting memberikan wawasan dan melatih para kepala sekolah agar membiasakan melakukan proses analisis dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pendidikan. Adanya kegiatan PPM dimaksudkan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah tentang proses analisis kebijakan.

B. Landasan Teori

1. Konsep Analisis Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 138). Perumusan visi dan misi pendidikan tergantung pada aspek-aspek politik-sosial-ekonomi di mana manusia itu hidup. Selanjutnya, karena pendidikan itu merupakan suatu ilmu pengetahuan praksis, yaitu merupakan kesatuan antara teori dan praktik, maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting pula dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diujicobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih mempertajam visi dan misi pendidikan.

Michael Hill (H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 244) mengemukakan adanya dua jenis analisis kebijakan, yaitu; analisis tentang suatu kebijakan (*analysis of policies*) dan analisis untuk suatu kebijakan (*analysis for policies*), seperti tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1
Analisis Kebijakan

<i>Analysis of Policy</i>	<i>Analysis for Policy</i>
<i>Studies of contents</i>	<i>Policy evaluation</i>
<i>Studies of policy outputs</i>	<i>Information for policy making</i>
<i>Studies of process</i>	<i>Process advocacy</i>
	<i>Policy advocacy</i>

Jadi pemahaman tentang analisis kebijakan pendidikan tidak serta merta berkenaan dengan analisis untuk merumuskan kebijakan, namun bisa juga analisis tentang kebijakan. Analisis tentang kebijakan biasanya berbentuk analisis dalam kerangka hukum dan kelembagaan suatu kebijakan. Metode yang dilakukan biasanya adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian tentang output kebijakan dilakukan dalam bentuk kajian tentang hasil dari suatu kebijakan, khususnya untuk menjelaskan mengapa pemerintah mengeluarkan biaya untuk kebijakan tertentu. Penelitian tentang proses kebijakan berkenaan dengan bagaimana kebijakan dibentuk dan dilaksanakan dalam suatu lingkungan kebijakan tertentu.

Analisis untuk kebijakan pendidikan dapat dipahami dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Analisis dalam bentuk evaluasi tentang *impact*/dampak suatu kebijakan atau kemungkinan dampak kebijakan pada suatu kebijakan.
- b. Analisis untuk menyediakan informasi dalam rangka pembuatan keputusan.
- c. Analisis dalam bentuk advokasi proses kebijakan adalah analisis kebijakan yang ditujukan untuk memberikan nasihat atau *advis* kebijakan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
- d. Analisis kebijakan dalam bentuk nasihat kebijakan, yaitu berupa analisis kebijakan yang ditujukan untuk menyempurnakan suatu kebijakan yang ada.

Pemilahan analisis kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilahan Analisis Kebijakan

<i>Analysis of Policy</i>	<i>Analysis for Policy</i>
Penelitian tentang isi kebijakan	Analisis untuk merumuskan kebijakan
Penelitian tentang implementasi kebijakan	Analisis untuk memprediksi dampak kebijakan
Penelitian tentang kinerja kebijakan	Analisis untuk memperbaiki isi kebijakan
Penelitian tentang lingkungan kebijakan	Analisis untuk memperbaiki implementasi kebijakan
Penelitian tentang proses kebijakan	Analisis untuk memperbaiki proses kebijakan

Analysis for Policy atau analisis untuk kebijakan dapat dipahami sebagai analisis yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan. Analisis untuk kebijakan merupakan proses perencanaan dan perumusan kebijakan dengan menggunakan hasil analisis atas kebijakan (penelitian kebijakan). Oleh karena itu, data penelitian digunakan sebagai masukan untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Penelitian ini akan mengembangkan model penelitian yang dapat diberikan kepada para pembuat kebijakan pendidikan (*policy maker*) dan pembuat keputusan (*decision maker*) agar mereka dapat melakukan analisis dalam menyusun kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

2. Penelitian Kebijakan

Weimer (2009: 93) membedakan tentang penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. Penelitian kebijakan secara jelas memuat analisis kebijakan, khususnya tentang arti penting dan hakikat permasalahan kebijakan, serta dampaknya terhadap berbagai kebijakan yang lebih khusus. Penelitian kebijakan juga berkontribusi terhadap tuntutan bagi analisis kebijakan dengan memunculkan kondisi yang tidak diinginkan atau dengan menunjukkan intervensi kebijakan tertentu untuk mengatasi kondisi yang tidak diinginkan tersebut.

Konsep dan kebutuhan akan analisis kebijakan selama ini kurang berpengaruh terhadap keberadaan penelitian kebijakan. Hal yang demikian itu sebenarnya tidak menguntungkan. Seharusnya dengan mengantisipasi potensi kegunaan dari hasil temuan penelitian di dalam analisis kebijakan akan membuat hasil penelitian tersebut lebih berguna. Mengabaikan analisis kebijakan juga tidak

menguntungkan. Dengan mengadopsi pandangan nilai-nilai sosial yang lebih komprehensif dapat membantu dalam hal advokasi, walaupun ada kontroversi tetapi itu menjadi hal yang biasa di dalam penelitian pendidikan (Weimer, 2009: 94).

Penelitian kebijakan biasanya dipraktikkan secara berbeda-beda untuk berbagai kepentingan dari analisis kebijakan. Penelitian kebijakan dibuat untuk kegunaan membuat pilihan-pilihan kebijakan. Penelitian kebijakan juga membantu menjelaskan mengapa kajian akademik menjadikan penelitian kebijakan menjadi jauh dari analisis kebijakan. Baik penelitian kebijakan maupun analisis kebijakan mengusahakan kontribusinya bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Penelitian kebijakan biasanya terfokus pada nilai-nilai partikular atau tujuan tertentu (seperti meningkatkan prestasi siswa) yang merupakan hal penting dan dipengaruhi berbagai kebijakan yang pengaruhnya dapat dievaluasi melalui kajian yang sistematis. Seringkali nilai itu sendiri implisit, juga pengaruhnya mungkin lebih besar dan lebih diinginkan. Sebaliknya, analisis kebijakan mencari pertimbangan dalam nilai-nilai sosial masyarakat.

Penelitian kebijakan berfokus pada kebijakan tunggal sebab dengan penerapan kebijakan telah terkumpul data untuk dapat dievaluasi dampak-dampaknya. Sesungguhnya, penelitian kebijakan sering mengikuti "model evaluasi", yang mengevaluasi dampak yang terjadi disebabkan adanya berbagai intervensi. Penelitian kebijakan yang baik secara jelas mendokumentasikan unsur-unsur penting dari kebijakan, tetapi jarang memberikan data detail untuk implementasi segera dalam konteks yang berbeda. Penelitian kebijakan itu bersifat penilaian umum, tidak spesifik, penerapan dari alternatif kebijakan. Sebaliknya, analisis kebijakan itu nilai-nilainya bersifat komprehensif dan eksplisit, alternatifnya kongkrit, berguna untuk para pengambil kebijakan, dimotivasi oleh keharusan membuat kebijakan dan penyebarannya bersifat terbatas (sempit), rekomendasi yang diberikan juga sangat spesifik (Weimer, 2009: 94).

Pendapat Weimer tersebut sejalan dengan pendapat Purwosantoso (2013: 2) yang mengatakan bahwa kebijakan pendidikan penting dilakukan dalam perspektif pendidikan. Pendidikan menjadi perspektif, artinya pendidikan tidak hanya diketahui apanya (ontologi), tetapi bagaimana pendidikan dapat membawa ke arah perbaikan bersama. Studi kebijakan yang ada selama ini biasanya

dilakukan oleh penguasa hanya untuk memperdaya rakyat. Rakyat tidak sanggup mengkritisi. Perspektifnya selalu penguasa. Studi yang ada sudah menghasilkan orientasi tertentu. Maka, perlu adanya reorientasi kebijakan public yang bukan lagi pada kekuasaan, tetapi pendidikan. Orientasi politik sudah usang. Sekarang ini semakin dipopulerkan *learning approach of government*.

Dari pendapat Weimer dan Purwosantoso tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan sebelum implementasi kebijakan, sedangkan penelitian kebijakan dilakukan setelah diterapkannya suatu kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan berguna untuk dasar pengambilan keputusan (kebijakan) para pengambil kebijakan, sehingga analisis kebijakan pendidikan menjadi penting untuk dilakukan oleh para kepala sekolah sebagai para pengambil kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan berorientasi pada ilmu pendidikan, bukan politik atau yang lain.

D. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah:

Masih banyak kebijakan pendidikan yang ditetapkan tanpa melalui suatu proses analisis kebijakan.

2. Rumusan masalah:

"Bagaimana pelaksanaan pelatihan analisis kebijakan pendidikan bagi kepala sekolah dasar di kota Yogyakarta?"

E. Tujuan Kegiatan

Secara umum, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan, dan pendampingan kepada para kepala sekolah dasar agar dapat melakukan analisis kebijakan pendidikan di dalam lingkungan satuan pendidikan yang dipimpinnya.

F. Manfaat Kegiatan

Pelatihan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

Bagi Dosen

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat meningkatkan wawasan, dan keterampilan di kalangan dosen dalam melatih dan melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran mengenai analisis kebijakan pendidikan. Dengan model